

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN TARAAN
TRIWULAN I TAHUN 2025



BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
BAB II	4
PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden	6
BAB III	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	7
3.1 Jumlah Responden SKM	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	9
BAB IV	10
ANALISIS HASIL SKM	10
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	10
4.2 Rencana Tindak Lanjut	11
4.3 Tren Nilai SKM	12
BAB V	13
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	14
1. 14	
2. Hasil Pengolahan Data SKM	15
3. 15	
4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamankan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Tarakan sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Tarakan

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPP BPPMHKP dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Tarakan adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner *online* melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/5> (Diisi sesuai link kuesioner SKM UPP BPPMHKP) yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Tarakan yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui link kuesioner yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik per-triwulan dengan jangka waktu (periode) yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 4 (empat) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Januari 2025	8
2.	Pengumpulan Data	Januari-Maret 2025	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	April 2025	7
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	April 2025	7

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Tarakan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan triwulan IV tahun 2024, maka populasi penerima layanan pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Tarakan dalam kurun waktu triwulan IV tahun 2024 adalah sebanyak 10 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 10 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 24 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	17	85%
		Perempuan	3	15%
2	Usia	<25	0	0%
		25-45	12	60%
		46-60	8	40%
		>60	0	0%
3	Pendidikan	SD	0	0%
		SMP	0	0%
		SMA	0	0%
		D3	4	20%
		S1	16	80%
		S2	0	0%
		S3	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	0	0%
		TNI/POLRI	0	0%
		Pelaku Usaha KKP	3	13%
		Pegawai Swasta	21	87%
		Wirausaha Non KKP	0	0%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0
5	Jenis Layanan	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif	0	0%

		Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	0	0%
		Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	6	25%
		Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	11	46%
		Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	7	29%
		Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	0	0%

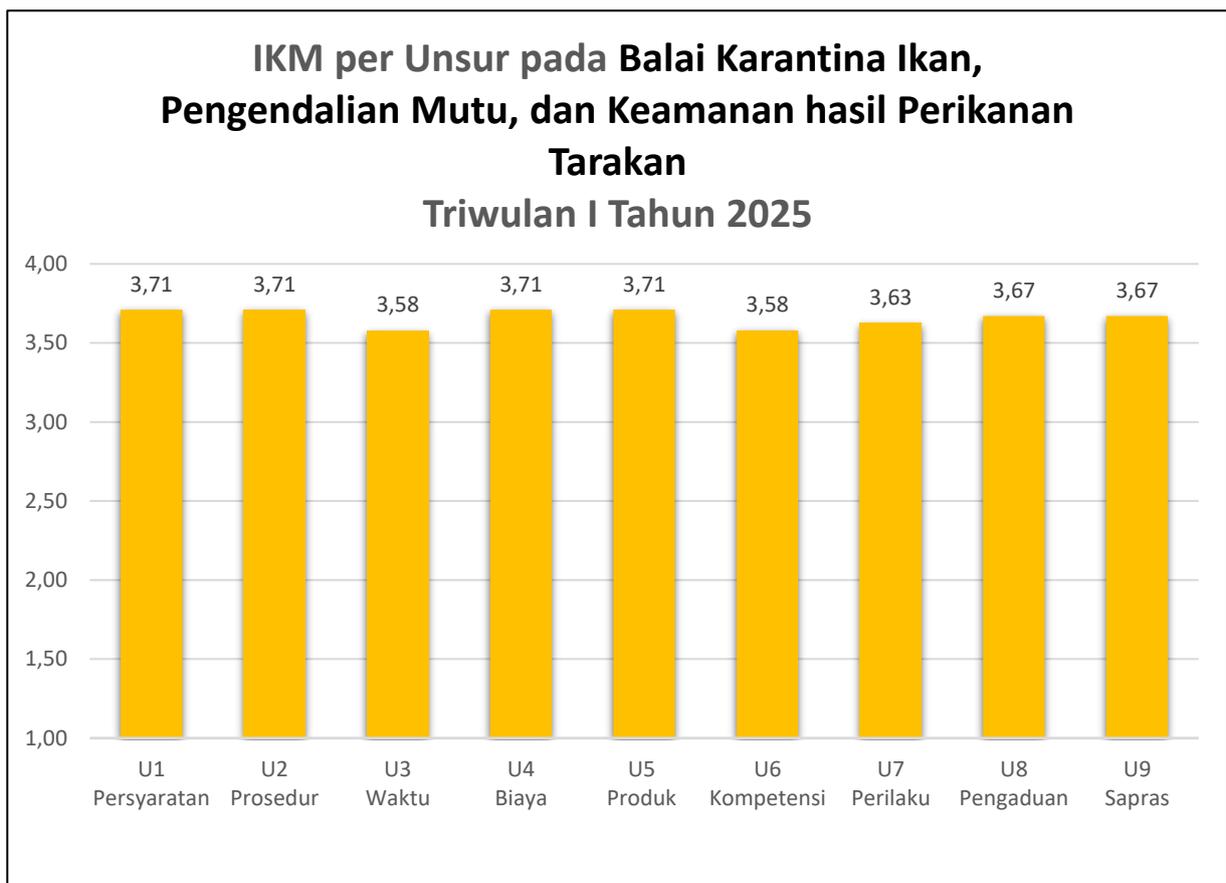
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	92,71	92,71	89,58	92,71	92,71	89,58	90,63	91,67	91,67
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	91,55 (A atau Sangat Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Dua unsur layanan terendah yang didapatkan ialah Waktu Penyelesaian dan Kompetensi Pelayanan mendapatkan nilai terendah pertama dan kedua yaitu **3,58**.
2. Sedangkan Empat unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan masing masing mendapatkan nilai tertinggi yang sama yaitu **3,71**. Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui link kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :
 - “Tambahkan fitur copy dokumen pada sistem SIAPMUTU”.
 - “Aplikasi Siap mutu kalau bisa di tambahkan fitur copy dokumen/pengajuan sebelumnya”.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Kompetensi pelayanan perlu ditingkatkan lagi dengan mengikuti berbagai pelatihan terkait pelayanan publik.
- Waktu Penyelesaian perlu diperhatikan Kembali sesuai dengan SOP dan janji layanan yang ada.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

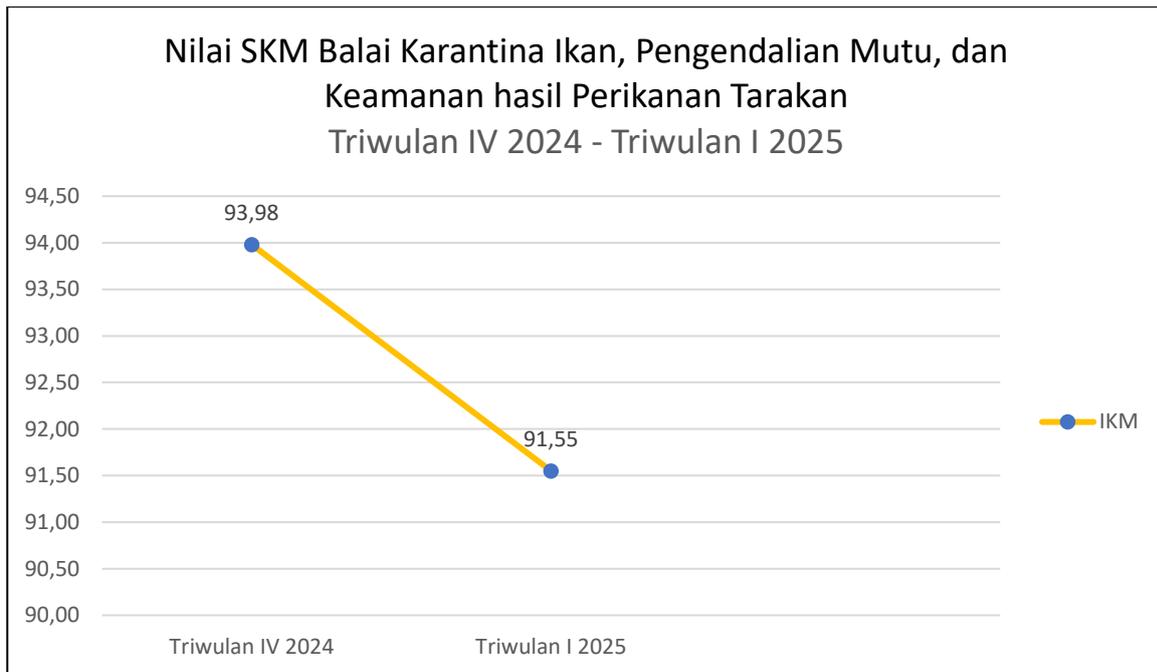
Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada bulan Mei 2025 (Berita Acara terlampir). Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan

jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan II 2025)			Penanggung Jawab
			April	Mei	Juni	
1	Kompetensi Pelayanan	Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan (kecepatan jaringan internet, kendala aplikasi OSS, aplikasi SIAPMUTU dsb)			√	Tim Pelayanan Publik
2	Waktu Penyelesaian	Membuat kompensasi layanan (permintaan maaf, pemberian cenderamata, pemberian sanksi kepada petugas layanan dsb)		√		Tim Pelayanan Publik

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Tarakan dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari periode triwulan IV 2024 hingga triwulan I 2025 pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Tarakan

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Triwulan I mulai Januari hingga Maret 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Tarakan, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM **91,55**. Kemudian nilai SKM Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Tarakan menunjukkan sedikit penurunan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan IV 2024 hingga triwulan I 2025.
- Unsur pelayanan yang termasuk unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Kompetensi Pelayanan dan waktu penyelesaian.
- Sedangkan unsur layanan dengan nilai tertinggi Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.

Tarakan, 31 Maret 2025

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian

Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Tarakan



Darmansyah

NIP. 197807042008011014

LAMPIRAN

1. Kuesioner Online

Data Layanan

Pilih Layanan

- Perjanjian Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)
- Perjanjian kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (relabel Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)
- Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air
- Penerbitan Sertifikat Kebijakan Pengalangan
- Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan
- Penerbitan Sertifikat Cara Pengalangan Ikan Yang Baik
- Penerbitan Sertifikat Cara Pemberihan Ikan Yang Baik
- Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembualan Pakan Ikan Yang Baik
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik
- Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik

Data Responden

Waktu Survey: 19-Feb-2025 13:19

Nama:

Jenis Usaha

- Perseorangan
- Korporasi

Jenis Kelamin/Gender

- Pria/Laki-laki
- Wanita/Perempuan

Usia

- < 25 Tahun
- 25 s/d 45 Tahun
- 46 s/d 60 Tahun
- > 60 Tahun

Pendidikan

- SD
- SMP
- SMA
- D3
- S1
- S2
- S3

Pekerjaan

- ASN
- TNI/POLRI
- Pelaku Usaha KIP
- Pegawai Swasta
- Wirasaha Non KIP
- Pelajar / Mahasiswa

Pertanyaan

1. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang **kesesuaian persyaratan** pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan?
(Apakah anda/badan hukum/orgnisasi dapat memahami persyaratan pelayanan Penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP yang tersedia diurla BOPM)

- Sangat sesuai
- Sesuai
- Kurang sesuai
- Tidak sesuai

2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kemudahan prosedur** yang dijalani untuk mendapatkan layanan?

- Sangat Mudah
- Mudah
- Kurang mudah
- Tidak mudah

3. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian jangka waktu penyelesaian** pelayanan dengan yang diinformasikan?

- Sangat sesuai
- Sesuai
- Kurang sesuai
- Tidak sesuai

4. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian biaya** pelayanan yang dibayarkan dengan yang diinformasikan?

- Sangat sesuai
- Sesuai
- Kurang sesuai
- Tidak sesuai

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang **kesesuaian produk** pelayanan antara yang ada pada publikasi dengan pelayanan yang diberikan?

- Sangat sesuai
- Sesuai
- Kurang sesuai
- Tidak sesuai

6. Bagaimana **kecepatan respon** (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan?

- Sangat Cepat
- Cepat
- Kurang cepat
- Lambat

7. Bagaimana **kemudahan dalam penggunaan fitur** pada aplikasi sistem layanan?

- Sangat Mudah
- Mudah
- Kurang mudah
- Tidak mudah

8. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **layanan konsultasi dan pengaduan** yang tersedia (sarana pengaduan/kemudahan mengadukan/indak lanjut)?

- Sangat baik
- Baik
- Kurang baik
- Tidak baik

9. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang **kualitas isi/konten** dari aplikasi sistem layanan?

- Sangat baik
- Baik
- Kurang baik
- Tidak baik

Kesimpulan

Apakah petugas telah memberikan pelayanan secara prima (sikap, keterampilan dan penampilan)

☆☆☆☆☆

Kritik dan Saran *J Harus diisi minimal 3 kata

[Submisi Form](#)

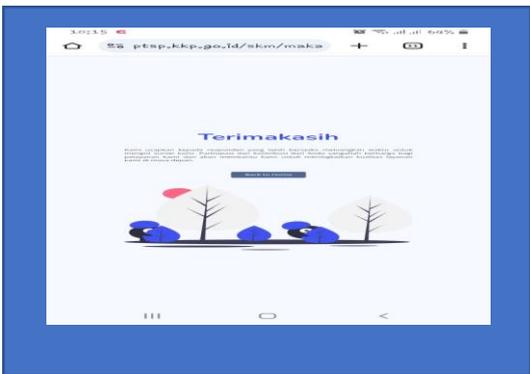
*J Pastikan anda telah mengisi seluruh pertanyaan sebelum submit

2. Hasil Pengolahan Data SKM

TABEL PERHITUNGAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)																			
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN																			
PERIODE TRIWULAN I 2025																			
NO	JENIS LAYANAN	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	NILAI UNSUR PELAYANAN									KRITIK DAN SARAN	NILAI PER JENIS LAYANAN	NRR PER JENIS LAYANAN		
						U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9					
1	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan	Laki-laki	25-45	S1	swasta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Semoga pelayanannya semakin memajukan dan mudah	75,00	94,70	
2	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan	Laki-laki	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tambahkan fitur copy dokumen pada sistem SIAPAMUTU	100,00		
3	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan	Laki-laki	46-60	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan terhadap pengguna jasa sangat baik dan semoga tetap semangat	100,00		
4	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan	Laki-laki	25-45	S1	P. UKKP	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	sebelum nya	97,22		
5	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan	Laki-laki	46-60	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Semangat dalam pelayanan.	100,00		
6	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan	Laki-laki	25-45	S1	swasta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	menjadi lebih baik lagi	75,00		
7	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan	Laki-laki	46-60	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Semoga tetap baik dan semangat dalam melayani pengguna jasa	100,00		
8	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan	Laki-laki	25-45	S1	swasta	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	Pelayanan sudah cukup	94,44		
9	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan	Laki-laki	46-60	S1	P. UKKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Semoga semakin Baik	100,00		
10	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan	Laki-laki	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Fitur copy dokumen pada sistem SIAPAMUTU tolong d tambahkan	100,00		
11	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan	Laki-laki	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Fitur copy dokumen pada sistem SIAPAMUTU tolong d tambahkan	100,00		
12	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu	Laki-laki	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kedepannya semoga lebih baik, dan responsif	100,00	94,44	
13	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu	Laki-laki	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Semoga terus dipertahankan yang sudah baik	100,00		
14	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu	Perempuan	25-45	S1	swasta	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	pelayanan ditingkatkan lagi	80,96		
15	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu	Perempuan	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Lebih baik lagi	100,00		
16	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu	Laki-laki	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan optimal harus dipertahankan	100,00		
17	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu	Laki-laki	25-45	S1	swasta	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	Mohon tetap melakukan peningkatan dan pembaharuan yg lebih baik	86,11		
18	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Laki-laki	46-60	D3	swasta	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	Ramah,baik dan rapi	69,44	84,13	
19	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Laki-laki	25-45	D3	P. UKKP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Perbaikan berkelanjutan agar tambah baik		75,00
20	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Laki-laki	46-60	D3	swasta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	semoga sukses selalu	75,00		
21	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Laki-laki	25-45	D3	swasta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Sukses selalu dalam melakukan pelayanan perbaikan yang berkelanjutan.	75,00		
22	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Perempuan	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pertahankan apa yang sudah ada	100,00		
23	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Laki-laki	46-60	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Peringat ke web SKPnya, terimakasih	100,00		
24	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Laki-laki	25-45	S1	swasta	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	Pelayanan optimal harus dipertahankan	94,44		
Jumlah Nilai Per-unsur						89	89	86	89	89	86	87	88	88					
RATA-RATA PER-UNSUR						3,71	3,71	3,58	3,71	3,71	3,58	3,63	3,67	3,67					
NILAI INDEKS PER-UNSUR						0,41	0,41	0,40	0,41	0,41	0,40	0,40	0,41	0,41					
NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT						91,55									SANGAT BAIK	91,55			

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	21	88%
		Perempuan	3	13%
2	Usia	Dibawah 25	0	0%
		25-45	17	71%
		46-60	7	29%
		>60	0	0%
3	Pendidikan	SD	0	0%
		SMP	0	0%
		SMA	0	0%
		D3	4	17%
		S1	20	83%
		S2	0	0%
		S3	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	0	0%
		TNI/POLRI	0	0%
		Pelaku Usaha KKP	3	13%
		Pegawai Swasta	21	88%
		Wirasaha Non KKP	0	0%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0%
5	Jenis Layanan	Uji Profisiensi bagi laboratorium penguji penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif	0	0%
		Jasa penguji hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	0	0%
		Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	6	25%
		Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengelutaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	11	46%
		Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	7	29%
		Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembenhian ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat ikan Yang Baik	0	0%

3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM



4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya

**Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat
Periode Triwulan IV Tahun 2024**



**Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan
hasil Perikanan Tarakan**

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu

Hasil Kelautan dan Perikanan

2025

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk

mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Tarakan perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses *continuous improvement* dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Tarakan periode triwulan IV tahun 2024 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Triwulan IV Tahun 2024

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	3,67	A
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,83	A
3	Waktu Penyelesaian	3,67	A
4	Biaya/Tarif	3,83	A
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	3,67	A
6	Kompetensi Pelaksana	3,67	A
7	Perilaku Pelaksana	3,83	A
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,83	A
9	Sarana dan Prasarana	3,83	A

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk

memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 4 unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

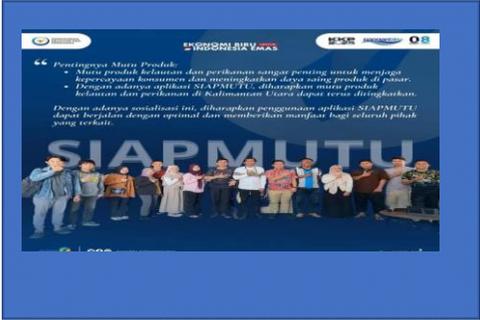
No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan I 2025)			Penanggung Jawab
			Januari	Februari	Maret	
1	Persyaratan layanan	Sosialisasi terkait SOP terbaru sesuai dengan Permen KP No.33 Tahun 2024		√		Tim Pelayanan Publik
2	Waktu penyelesaian	Sosialisasi terkait SOP terbaru sesuai dengan Permen KP No.33 Tahun 2024		√		Tim Pelayanan Publik
3	Kesesuaian Produk	Sosialisasi terkait SOP terbaru sesuai dengan Permen KP No.33 Tahun 2024		√		Tim Pelayanan Publik
4	Kecepatan Respon	Sosialisasi terkait SOP terbaru sesuai dengan Permen KP No.33 Tahun 2024		√		Tim Pelayanan Publik

BAB III

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan / Hambatan
1	Sosialisasi terkait SOP terbaru sesuai dengan Permen KP No.33 Tahun 2024	Sudah	Melakukan sosialisasi secara daring menggunakan aplikasi zoom meeting kepada pengguna jasa dengan pembahasan terkait produk spesifikasi jenis pelayanan yang terbaru		Jaringan internet terkadang kurang baik dan menghambat kegiatan sosialisasi
2	Publikasi persyaratan layanan melalui media cetak (banner, brosur, pamflet dsb) dan media elektronik (media sosial, tiktok, grup WA dsb)	Sudah	Melakukan publikasi prosedur layanan melalui media cetak banner dan media elektronik (IG, FB, dan X)		Tidak ada hambatan saat pelaksanaan

3	Publikasi prosedur layanan melalui media cetak (banner, brosur, pamflet dsb) dan media elektronik (media sosial, tiktok, grup WA dsb)	Sudah	Melakukan publikasi prosedur layanan melalui media cetak banner dan media elektronik (IG, FB, dan X)		Tidak ada hambatan saat pelaksanaan
---	---	-------	--	---	-------------------------------------

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Tarakan telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100% (prosentase dihitung dari realisasi tindak lanjut/jumlah rencana tindak lanjut X 100%)
2. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya RTL antara lain :

No	RTL	Strategi Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Stakeholder Terkait
1	Sosialisasi secara daring maupun luring kepada pengguna jasa terkait produk spesifikasi jenis pelayanan terbaru	Pemberitahuan melalui grup WA pengguna jasa atau pemberitahuan secara personal melalui WA atau tatap muka terkait produk spesifikasi jenis pelayanan	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Pengguna jasa lingkup Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Tarakan
2	Publikasi persyaratan layanan	Pemberitahuan melalui grup WA pengguna	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Pengguna jasa lingkup Balai Karantina Ikan,

	melalui media cetak (banner, brosur, pamflet dsb) dan media elektronik (media sosial, tiktok, grup WA dsb)	jasa atau pemberitahuan secara personal melalui WA atau tatap muka terkait persyaratan layanan			Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Tarakan
3	Publikasi prosedur layanan melalui media cetak (banner, brosur, pamflet dsb) dan media elektronik (media sosial, tiktok, grup WA dsb)	Pemberitahuan melalui grup WA pengguna jasa atau pemberitahuan secara personal melalui WA atau tatap muka terkait prosedur layanan	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Pengguna jasa lingkup Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Tarakan

Tarakan, 31 Maret 2025

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan
Keamanan hasil Perikanan Tarakan



[Handwritten Signature]
Darmansyah
NIP. 197807042008011014



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id SUREL set.bppmhkp@kkp.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK
LINGKUP BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Pelayanan Publik, dan adanya perubahan organisasi dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tentang Tim Pengelolaan Pelayanan Publik lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5

Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TIM PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK LINGKUP BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Pelayanan Publik Lingkup Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Tim Pengelolaan Pelayanan Publik Lingkup Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melakukan koordinasi pengelolaan pelayanan publik dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
 2. Melakukan koordinasi pengelolaan pelayanan publik pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
 3. Melaksanakan penatalaksanaan Pelayanan Publik dalam pencapaian IKU BPPMHKP yang meliputi :
 - a. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan BPPMHKP; dan
 - b. Persentase unit kerja di lingkup BPPMHKP yang memenuhi nilai minimal proposal inovasi pelayanan publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Pengelolaan Pelayanan Publik Lingkup BPPMHKP bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan melalui Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Dalam hal terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dapat menetapkan perubahan keanggotaan Tim.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan kepada satuan kerja pada lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2025

KEPALA BADAN PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

ISHARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Pengendalian
dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan,



Hari Meryadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK
LINGKUP BADAN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK
LINGKUP BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

- A. Pembina
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
- B. Ketua
Ir. Hari Maryadi, M.Si (Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan)
- C. Ketua Harian
Anugerah Rindrasri, S.H (Ketua Tim Kerja Pelayanan Publik)
- D. Sekretaris
1. Yusixka Warih Satyaningrum, S.Pi
2. Rizqi Gustiawan, A.Md
- E. Anggota pada Sekretariat dan Pusat lingkup BPPMHKP
1. Wawing Walidi, S.Pi, M.Sc
2. Farra Dian Jauhari, A.Md
3. Aryo Widyarso Putro, S.E
4. Martono, S.Pi
5. Rian Kurniawan, S.Pi., M.Tr. Pi.
- F. Anggota pada Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP

No	Unit Pelayanan Publik	Nama Anggota
1	Balai Besar KIPM Jakarta I	Noviana Dewi, S.Pi, M.Tr.Pi,
		Galih Pratomo Suwatno, A.Md
		Muji Dwi Saptono, A.Pi, M.M
2	Balai Besar KIPM Makassar	Sri Rahayu Setyaningsih, S.St.Pi., M.Sc
		Arniyanti, A.Md, S.A.P
3	Balai KIPM Denpasar	Eka Indra Supriyatna, A.Md
		Moh. Qosyim Ayyubi, S.Pi
		Efendi Setiawan, S.H
4	Balai KIPM Surabaya I	Eka Anis Rhofita, S.Kom
		Drajat Hexanto Wirutomo, S.Sos
		Kurnia Catur Pratiwi, S.E
5	Balai KIPM Medan I	Retna Damayanti, S.Si
		Alexander Amin Hutabarat, S.Pi
6	Balai KIPM Balikpapan	Novita, S.St.Pi
7	Balai KIPM Jayapura	Fitriah Haji Ali, S.St.Pi

No	Unit Pelayanan Publik	Nama Anggota
		Engelina P. Kalensun, S.Kom
		Chandra Kirana, A.Md
8	Balai KIPM Jakarta II	Diah Ayu Kumalasari , A.Md
		Dimas Adi Wibowo , A.Md
9	Balai KIPM Surabaya II	Nurhidayati, S.Kom
		Elys Srifatul Khozin, S.Si
		Umi Faristin, A.Md
10	Balai KIPM Mataram	drh. Amira Baihani, M.P
		Bagus Kurnia Winanto, A. Md,. Kom
11	Balai KIPM Manado	drh. Adhi Dharmawan
		Muhammad Hamka, A.Md
12	Balai KIPM Semarang	Sudarmawan, SE
		Benny Puspoaji, A.Md
13	Balai KIPM Banjarmasin	Tri Setyaningsih, S.Pi
		Siti Sakinah, S.Pi
14	Balai KIPM Lampung	Santi Saluri Alam, S.Pi
		Pattulloh, S.Pi
		Dini Oktaviani, S.Pi
		Yayan Haryani, A.Md
15	Balai KIPM Ambon	Hilda Madubun, A.Md
16	Balai KIPM Entikong	Rahmat, S.Pi
		Oktaviyani Dyah Rustikawati, SE
		Aditya, A.Md
17	Balai KIPM Tanjung Pinang	Reni Susanti, S.Pi
		Rini Susanty
18	Balai KIPM Tarakan	Eko Syahrudi, S.Pi
		Whidi Anggraeni, S.Pi
		Eko Prasetya Budi, S.Mn
19	Stasiun KIPM Palembang	Bony Saputra, S.St.Pi
		drh. Arief Sulistiyono, M.Sc
		Bambang Yuliantoro, S.Pi
20	Stasiun KIPM Bandung	Isep Wahyudin, S.Pi
		Andriani Deni Efendi, S.H
		Ridwan Purnama, S.ST
21	Stasiun KIPM Merauke	Fajar Fauzy Arie Widhaya, S.Pi
		Siti Diah Setiawati, S.Pi
22	Stasiun KIPM Pontianak	Febriana Widyanti, A.Md
23	Stasiun KIPM Kendari	Tamrin, S.Pi, M.M
24	Stasiun KIPM Batam	Febri Amin Budiansyah, ST
25	Stasiun KIPM Padang	Rini Sardi, S. Pi
26	Stasiun KIPM Jambi	Meliya Bahnan A.Pi.M.Pi
		Rina Hernawati S.St.Pi, M.Pi
		Medina Simamora, SE
27	Stasiun KIPM Palu	Irmawan Syafitrianto, S.Pi.,M.P
		Andrat Yani Montolure, S.St.Pi, M.Si
28	Stasiun KIPM Palangkaraya	Fatimah
		Akhmad Fakhirizal Nur, S.Pi, M.Pi
29	Stasiun KIPM Kupang	Achmad Efendi, S.Pi
30	Stasiun KIPM	Boby Dani Darmawan, S.St.Pi, M.Pi

No	Unit Pelayanan Publik	Nama Anggota
	Pangkalpinang	Puteri Aulia Rizki Romdani, S.Pi
31	Stasiun KIPM Ternate	Muh. Arfah H
32	Stasiun KIPM Yogyakarta	Izaak Andriee, S.St.Pi., M.Si
33	Stasiun KIPM Aceh	Tanzaniah, S.Pi Destin widya
34	Stasiun KIPM Gorontalo	Takwin Suleman Sitti Rosnany, S.Pi
35	Stasiun KIPM Pekanbaru	Risma D. Simanjuntak, S.Si
36	Stasiun KIPM Medan II	Nyoman Fitria Ditha Marciella, A.Md Toibullah Siregar, A.Md, S.Pi
37	Stasiun KIPM Sorong	Muhammad David Brillian, A.Md.T.P Maslina, S.St.Pi Fajar Faisal Rumuy, A.Md
38	Stasiun KIPM Bengkulu	Wismen Ella Fitri, A.Md
39	Stasiun KIPM Cirebon	Atmaji Yuwono, S.Pi., M.A.P Erry Purwati, S.Pi., M.Si Fajar Nugroho, A.Md., S.Pi Dyah Ika Nugraheni, S.Pi, M.Si
40	Luwuk Banggai	Dedi Susanto, S.P Fara Alda Apriliana A. Md
41	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	Fadli Pramana, S.Pi Isma Ameliawati Meirani, S,St.Pi
42	Stasiun KIPM Bima	Dita Antonisa Wielna, A.Md Mega ayu Tresna
43	Stasiun KIPM Tahuna	Farid Kampi, S.Mn Dwikly Toesan
44	Stasiun KIPM Bau Bau	Riki Purnomo, S.ST.Pi Saptari Joan Tatra, S.Pi
45	Stasiun KIPM Merak	Muklasin, S.St.Pi
46	Stasiun KIPM Mamuju	A. Arham Hasanuddin, S.Pi Sry Zuriyanti, S.Pi Rendy Alif Utama
47	Balai Uji Standar KIPM	Hutomo Widiatmojo, S.Far Rino Masril, S.Si

KEPALA BADAN PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

ISHARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Pengendalian
dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan,



Hari Maryadi